

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BLT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SAKO BARU KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG

Muhammad Atallariq Daffarial Ilham
NPP. 30.0353
Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Kebijakan Publik

Email: @gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): The implementation of the direct cash assistance program policy in the Sako Baru sub-district, namely implementing the direct cash assistance program policy in the Sako Baru sub-district, from implementing it, the Sako Baru sub-district can reduce the number of ruins in the Sako Baru sub-district. **Purpose:** This research is intended to determine the implementation of direct cash assistance program policies in the Sako Baru sub-district, Palembang city. **Method:** This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The informants of this study consisted of 6 (six) people who were determined using purposive sampling. **Result:** The results of the research implementation of the direct cash assistance program policy in the Sako Baru sub-district consist of nine sub-indicators, namely (1) The interests affected by the direct cash assistance program policy are the poor and vulnerable to poverty. (2) The types of benefits generated from stakeholders and the poor are very good. (3) The degree of change that has been felt by the poor recipients of the BLT program. (4) The implementation of the program is considered to have been carried out effectively and on target. (5) The decision-making location in this case has been determined according to existing rules or regulations. (6) The included resources are divided into two, namely infrastructure resources and human resources. (7) The characteristics of institutions and authorities, namely that the Sako Baru Village wants to play a direct role in realizing the aspirations of the regional head, in this case the Mayor. (8) Compliance and responsiveness resulting from this program have a positive response, namely the community welcomes and fulfills the requirements to receive direct cash assistance. (9) The power, interests and strategic actors included are divided into two, namely directly and indirectly, both of which are quite good in the direct cash assistance program in the Sako Baru subdistrict. **Conclusion:** The program policy implemented by the government in the form of direct cash assistance in the Sako Baru Village can be said that this program has been running consistently for years, helping the poor in meeting their needs, and has been running well in accordance with existing regulations.

Keywords: Implementation, Poverty, Community, Direct Cash Assistance (BLT)

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai di kelurahan Sako Baru yaitu mengimplementasikan kebijakan program bantuan langsung tunai di kelurahan Sako Baru dari pengimplementasian itu kelurahan Sako Baru dapat mengurangi jumlah

angka kemiskinan yang ada di kelurahan Sako Baru. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai di kelurahan Sako Baru kota Palembang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini terdiri dari 6 (Enam) orang yang ditentukan menggunakan purposive sampling. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai di kelurahan Sako Baru, terdiri dari sembilan sub indikator yaitu (1) Kepentingan yang dipengaruhi dari kebijakan program bantuan langsung tunai adalah masyarakat miskin dan rentan miskin. (2) Tipe manfaat yang dihasilkan dari stakeholder dan masyarakat miskin sangat baik. (3) Derajat perubahan sudah dirasakan oleh masyarakat miskin penerima program BLT. (4) Pelaksanaan program dinilai sudah dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. (5) Letak pengambilan keputusan dalam hal ini sudah ditetapkan sesuai aturan atau regulasi yang ada. (6) Sumber daya yang dilibatkan, terbagi menjadi dua yaitu sumber daya sarana prasarana dan sumber daya manusia. (7) Karakteristik lembaga dan penguasa yaitu kelurahan sako baru ingin berpean langsung dalam mewujudkan cita-cita kepala daerah dalam hal ini adalah Walikota. (8) Kepatuhan dan daya tanggap yang dihasilkan dari program ini berespon positif yaitu masyarakat menyambut baik dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan langsung tunai. (9) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang dilibatkan dibagi menjadi dua yaitu secara langsung dan tidak langsung keduanya sudah cukup baik dalam program penyaluran bantuan langsung tunai di kelurahan Sako Baru. **Kesimpulan:** Kebijakan program yang dilakukan oleh pemerintah berupa bantuan langsung tunai di Kelurahan Sako Baru dapat dikatakan Program ini telah berjalan secara konsisten selama bertahun-tahun, membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya, dan telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada.

Kata kunci: : Implementasi, Kemiskinan, Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai (BLT)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perpres 104 Tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022. Peraturan yang menekankan bahwa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dianggarkan sebesar paling sedikit minimal 40% dari pagu dana desa yang diterima setiap desanya pada tahun 2022. Presiden membuat peraturan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut guna memaksimalkan manfaat yang diperoleh masyarakat akan bantuan yang diprogramkan oleh pemerintah, program tersebut diharapkan dapat membuat ekonomi masyarakat yang kurang mampu dapat meningkat dari sebelum mereka mendapatkan bantuan tersebut.

Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Pengawasan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial semuanya diatur dalam Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 14 Tahun 2021. Pemerintah kota Palembang membuat peraturan tersebut dengan harapan program yang dibuat dapat tepat sasaran serta terhindar dari penyalagunaan dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Peraturan ini membuat kecilnya kemungkinan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan yang bukan haknya, kemudian antara pemerintah dan masyarakat harus tertib administrasi seperti pelaporan dan pertanggung jawaban atas dana yang diberikan oleh pemerintah serta diterima oleh masyarakat yang kurang mampu tersebut.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dibuat pemerintah bertujuan untuk menaikkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu di wilayah tersebut, dengan harapan terjadinya penurunan jumlah masyarakat kurang mampu yang signifikan. Masyarakat miskin seharusnya mencari informasi agar memenuhi kategori penerima program bantuan dari Pemerintah ini. Pada rentang Tahun 2020 tercatat sebanyak 1.668.164 Jiwa di kota Palembang memenuhi kategori orang miskin, kemudian Dinas

Sosial Kota Palembang juga mendapati jumlah penduduk miskin di Kota Palembang sebanyak 181.000 jiwa yang sesuai dan memenuhi kategori masyarakat miskin. Jumlah masyarakat miskin di Kota Palembang masih lebih dari 10% dari jumlah total penduduk di Kota Palembang, tetapi yang sangat disayangkan jumlah masyarakat yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Palembang masih berada dibawah 10% dari jumlah masyarakat miskin di kota Palembang yaitu sebanyak 13.282 jiwa.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kelurahan Sako Baru berjumlah 7459 yang tercatat oleh kelurahan tersebut. Kemudian Kelurahan Sako baru mendapati masyarakat miskin di kelurahan tersebut sebanyak 3429 yang mana hampir 50% dari jumlah penduduk di kelurahan tersebut. Jumlah masyarakat miskin di Kelurahan Sako baru ternyata sangat tinggi dan yang menerima bantuan tersebut hanya berjumlah kurang lebih 500 atau sekitar 474, itu artinya masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan ini masih berada di bawah 20% dari jumlah penduduk miskin di kelurahan sako baru. Penduduk miskin di kelurahan sako baru seharusnya memanfaatkan program yang dibuat pemerintah dengan cara mencari informasi serta memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sako baru, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Pertambahan jumlah penduduk yang pesat akan berdampak langsung pada kabupaten atau kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, yang akan memiliki persentase penduduk tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 19,63% dibandingkan tahun 2020 dan 2022.

Tabel 1. 1
Jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Palembang

KETERANGAN	2020	2021	2022
JUMLAH PENDUDUK	1.668.164	1.686.073	1.695.055
JUMLAH PENDUDUK MISKIN	181.000	194.131	199.443
JUMLAH PENERIMA BLT	13.282	15.023	17.883

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat miskin di Kota Palembang yang belum mendapatkan bantuan langsung tunai, hal ini sangat disayangkan karena masih banyak masyarakat miskin yang belum terkena program pemerintah dikarenakan kurangnya informasi serta sosialisasi oleh pemerintah setempat. Masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih berada di bawah 10% dari total keseluruhan masyarakat miskin di wilayah tersebut, itu artinya masih ada 90% lebih masyarakat miskin yang belum merasakan program yang dibuat oleh pemerintah untuk membantu mensejahterakan masyarakat.

Angka penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak maksimal sangat merugikan masyarakat miskin yang seharusnya merasakan program dari pemerintah untuk meningkatkan ekonomi serta menjadi lebih sejahtera dari sebelum mendapatkan bantuan tersebut. Terbukti pada tahun 2020

sangat sedikit masyarakat miskin yang mendapatkan Program ini dari jumlah penduduk di Kota Palembang sebanyak 1.668.164 jiwa yang menerima program bantuan dari pemerintah tersebut hanya sebanyak 13.282 jiwa. Seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi serta menyebarkan informasi melalui berbagai macam cara agar pemerintah dapat menjalankan program tersebut dengan maksimal, sangat disayangkan apabila program yang bagus tidak dijalankan dengan baik. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di kota Palembang dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap penduduk miskin di Kota Palembang seperti keterlambatan dalam menganggarkan rencana keuangan untuk kegiatan bantuan langsung tunai (BLT). Keterlambatan pendistribusian dana bantuan langsung tunai (BLT) kepada KPM sering terjadi dan membuat masyarakat miskin yang termasuk dalam kategori penerima program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dirugikan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari Arifin yang berjudul “Pembangunan dan Problem Sosial Di Perkotaan Analisis Problem Kemiskinan Masyarakat Wonokromo Sebagai Dampak Pembangunan Kota Surabaya”, menjelaskan bahwa (1) Adanya kepentingan ekonomi dalam setiap pembangunan di wilayah Wonokromo. Hal ini disebabkan antara lain : a) Upaya pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, b) Lokasi atau lahan sangat strategis untuk kepentingan ekonomi investor, c) Kebijakan pembangunan yang di terapkan tidak disertai partisipasi warga dalam perumusan kebutuhan, (2) Problem kemiskinan yang timbul adalah akibat dari ketidaksamaan dalam penguasaan asset produksi, akses dan informasi kerja, minimnya fasilitas kesehatan, dan keharmonisan.

Penelitian dari Iqbal yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai tahun 2008 di Kabupaten Kudus” menjelaskan bahwa (1) Sosialisasi ini sudah melaksanakan dengan tepat hingga sampai Kecamatan, namun ini kurang yang menindaklanjuti dengan diadakan sosialisasi sampai desa atau kelurahan, (2) Verifikasi data nominasi RTS kurang sejalan dengan mestinya, 52 desa akan melaksanakan aturan ini.

Penelitian dari Zakiyah yang berjudul “Perempuan dan Kemiskinan (Studi Kasus Kehidupan Perempuan Sebagai Buruh Bangunan di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)” menjelaskan bahwa kehidupan perempuan sebagai buruh bangunan di Desa Tropodo sangat melekat dengan kemiskinan struktural, mereka menjadi buruh bangunan karena himpitan ekonomi keluarga dan tradisi atau kebiasaan dalam menjalani pekerjaan sebagai buruh bangunan akibat rendahnya tingkat pendidikan yang hanya mampu tingkat SD.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, pada penelitian yang dilakukan oleh Arifin berjudul “Pembangunan dan Problem Sosial Di Perkotaan Analisis Problem Kemiskinan Masyarakat Wonokromo Sebagai Dampak Pembangunan Kota Surabaya” membahas secara spesifik terkait pembangunan dan masalah sosial yang terjadi sebagai dampak dari adanya proses pembangunan di Kota Surabaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal berjudul “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai tahun 2008 di Kabupaten Kudus” membahas terkait penerapan BLT pada tahun 2008 yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kudus yang pasti jelas berbeda dengan penerapan program BLT pada tahun anggaran saat ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah berjudul “Perempuan dan Kemiskinan (Studi Kasus Kehidupan Perempuan Sebagai Buruh Bangunan di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)”, lebih fokus membahas terkait perempuan sebagai buruh bangunan dan juga kemiskinan yang terjadi di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang jelas tidak ada pembahasan secara spesifik terkait dengan program BLT.

1.5. Tujuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sako baru, Kecamatan Sako, Kota Palembang serta faktor penghambatnya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini karena peneliti ingin menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi saat penelitian berlangsung sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menjelaskannya dalam analisis dan perumusan masalah yang ditemukan saat di lapangan nantinya. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam latar alam yang unik, dan dengan menggunakan berbagai teknik ilmiah. (Moleong, 2007:6).

Pendekatan induktif telah dipilih, yaitu metode penalaran yang dimulai dengan pernyataan spesifik dan membangun argumen umum. (Nazir, 2014:166). Maka dari itu, penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana peneliti akan memberikan penjelasan peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan di Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sako baru, Kecamatan Sako, Kota Palembang, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive dan snowball sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grindle (1980) yang terdiri dari 2 (dua) dimensi yaitu: isi kebijakan dan konteks implementasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini berisikan kumpulan data, fakta, serta informasi yang berasal sebagai hasil dari penelitian di lapangan dari hasil penulis terkait Implementasi Kebijakan Program BLT Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako Kota Palembang yang selanjutnya akan di bahas dan disimpulkan. Observasi dan wawancara penelitian ini akan menghasilkan hasil yang akan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

3.1 Implementasi Kebijakan Program BLT Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako Kota Palembang

Keberhasilan dari Implementasi Kebijakan Program BLT Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako Kota Palembang yang akan di analisa oleh peneliti dengan menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, yang dikenal dengan *Implementation as a Political and Administrative Process*. Fokus dalam penelitian ini berdasarkan dua dimensi penelitian dari model implementasi Merilee S. Grindle sebagai berikut :

3.1.1 Isi Kebijakan (*Policy Content*)

Pada dimensi isi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle, terdapat 4 (empat) indikator yang

akan dijelaskan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sako baru, Kecamatan Sako adalah sebagai berikut :

a. *Interest affected (Kepentingan yang dipengaruhi)*

Kepentingan yang dipengaruhi daei kebijakan program bantuan langsung tunai adalah keluarga miskin yang tergolong kedalam Golongan Masyarakat tingkat miskin dan rentan miskin. Pemerintah sebagai fasilitator yang membuat program untuk masyarakat miskin dan rentan miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan hariannya sehingga dapat hidup lebih sejahtera. Program tersebut dimanfaatkan kelurahan sako baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan pra miskin agar dapat memiliki kehidupan yang lebih layak.

b. *Type of benefits (Tipe Manfaat)*

Agar kebijakan program bantuan langsung tunai berdampak positif, kebijakan tersebut perlu menawarkan berbagai manfaat. Nilai manfaat oleh kebijakan ini dapat dirasakan oleh banyak orang atau kelompok yang menjadi prioritas atau tujuan utama dari kebijakan yang dibuat tersebut. Program bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dan pra miskin sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kami masyarakat miskin merasa sangat terbantu dengan program tersebut karena pendapatan kami sangat kurang dan tidak menentu, sehingga uang yang kami terima tersebut dapat untuk menutupi hal-hal yang harus dibayar seperti listrik, sewa kontrakan dan makan sehari-hari. Stakeholders yang mendapatkan kemudahan untuk membuat masyarakat miskin dan pra miskin menjadi lebih sejahtera. Kemudian dari sisi masyarakat miskin dan pra miskin merasa terbantu dan sangat menerima dengan positif dari kebijakan pemerintah dengan membuat program bantuan langsung tunai.

c. *Extend of change envision (Derajat Perubahan yang Diharapkan)*

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan membuat suatu perubahan yang baik sehingga dapat sesuai dengan target yang ingin dicapai dalam membuat program tersebut yang mana pemerintah selaku pembuat kebijakan tersebut. Perubahan yang diharapkan oleh pemerintah tentu mengarah kepada perubahan yang luas dan berdampak positif. Sudah adanya perubahan yang dirasakan oleh masyarakat kurang mampu dan perubahan yang diharapkan oleh pemerintah. Masyarakat miskin dan pramiskin merasakan dampak yang positif dari program yang dibuat oleh pemerintah sehingga masyarakat miskin dan pra miskin menjadi lebih sejahtera dari sebelum adanya program bantuan langsung tunai. Sedangkan dari sisi pemerintah, sudah adanya dampak positif yang dihasilkan dari program tersebut yang telah direncanakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkhusus di Kelurahan Sako Baru

d. *Program implementer (pelaksana program)*

Sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan sudah pasti memiliki pelaksana yang bertugas untuk melaksanakan atau menjalankan suatu kebijakan sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dengan tidak adanya pelaksana kebijakan tentu kebijakan yang telah dibuat akan sulit untuk dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut tentu sudah tercantum dengan jelas dalam regulasi mengenai tugas dan kewenangan mengenai pelaksanaannya. Pemerintah pusat menyerahkan tugas kepada kelurahan untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat menerima bantuan langsung tunai secara efektif dan tepat sasaran. Kemudian kelurahan menjadi garis layanan terdepan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan serta informasi tentang program bantuan langsung tunai tersebut.

3.1.2 Policy Context (Konteks Kebijakan)

a. *Power, interest and strategy of actor involved (kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat)*

Pelaksanaan dari suatu kebijakan tidak terlepas dari pengaruh atas kekuasaan, kepentingan dan juga

strategi yang dilakukan oleh para aktor. Pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan serta aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum tidak ada pemanfaatan kekuasaan, kita hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai aturan yang ada. Masyarakat yang berhak menerima program bantuan langsung tunai adalah mereka yang sudah lulus persyaratan dalam kategori masyarakat miskin yang pantas menerima bantuan. Kemudian tidak ada juga kepentingan dari kami di kelurahan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari kebijakan serta tujuan yang telah ditetapkan. Untuk strategi yang digunakan dalam menindaklanjuti program pemerintah tersebut yaitu Lurah sebagai salah satu aktor yang terlibat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang siapa masyarakat yang mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut. Kelurahan Sako Baru tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Kemudian Kelurahan Sako Baru juga tidak memiliki motif untuk suatu kepentingan tertentu, tugas yang dilakukan oleh Kelurahan Sako Baru berdasarkan aturan atau regulasi yang telah ditetapkan. Strategi yang dilakukan oleh Lurah Sako Baru yang mana adalah salah satu aktor yang terlibat dalam program bantuan langsung tunai adalah dengan melakukan sosialisasi tentang siapa masyarakat yang pantas dan memenuhi syarat untuk mendapatkan program yang diberikan oleh negara dalam membantu masyarakat miskin dan pramiskin agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari

b. *Institution an regime characteristic* (Karakteristik lembaga dan penguasa)

Setiap kepala daerah memiliki ciri kepemimpinan yang beragam dalam memimpin dan mengurus suatu kebijakan. Dalam hal ini, karakteristik pemangku kepentingan disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan tanggung jawabnya. Jika dihubungkan kebijakan program bantuan langsung tunai dan kepala daerah yaitu Walikota maka beliau sangat setuju dengan program yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk di teruskan kesetiap pelosok daerah karena sangat membantu masyarakat yang tidak mampu untuk dapat hidup lebih sejahtera. Lembaga pemerintahan dalam hal ini kelurahan juga sangat merespon dengan positif program tersebut bahkan sangat serius dalam mewujudkan cita-cita pemerintah yaitu mensejahterakan seluruh masyarakat terkhususnya dalam hal ini Kelurahan Sako Baru. Kelurahan Sako Baru sangat menyambut program pemerintah yaitu bantuan langsung tunai dalam menangani permasalahan masyarakat yang tidak mampu untuk dapat merasakan kehidupan yang lebih layak. Kelurahan Sako Baru juga ingin berperan langsung dalam mewujudkan cita-cita pemerintah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat, hal ini juga sesuai dengan arahan kepala daerah yaitu Walikota untuk mengurus masyarakat di kelurahannya masing-masing.

c. *Compliance and responsiveness* (kepatuhan dan daya tanggap)

Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari para pelaksana kebijakan maupun dari masyarakat sebagai tujuan dari kebijakan program bantuan langsung tunai merupakan langkah nyata para pelaksana untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kebijakan program bantuan langsung tunai dengan sebaik-baiknya. Kelurahan Sako Baru melakukan seleksi secara teliti untuk memilih siapa saja masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk menerima program bantuan langsung tunai. Respon positif yang masyarakat timbulkan dari program bantuan langsung tunai di Kelurahan Sako Baru disambut baik oleh pemerintah dengan cara memberikan hak sepenuhnya kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

3.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program BLT Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako Kota Palembang

4.2.2.1. Letak Pengambilan Keputusan

3.2.1 Letak Pengambilan Keputusan

Lokasi pengambilan keputusan suatu kebijakan sangat berperan dalam implementasinya, maka perlu diberikan penjelasan mengenai lokasi pengambilan keputusan kebijakan pada bagian ini. Sebuah

keputusan akan membesar apabila pengambilan keputusannya semakin meluas dan membesar. Hambatan bagi pemerintah terkhusus Kelurahan Sako Baru adalah banyak masyarakat yang ingin menyalahgunakan program pemerintah berupa bantuan langsung tunai. Padahal masyarakat yang pantas menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah sudah diatur sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Pemerintah telah menetapkan apa saja persyaratan agar masyarakat dapat mendapatkan bantuan langsung tunai, sehingga masyarakat yang mampu tidak dapat menyalahgunakan program yang dibuat oleh pemerintah tersebut.

3.2.2. Sumber Daya Yang Dilibatkan

Berjalanya suatu kebijakan dengan baik tentu memiliki suatu unsur keterkaitan antara satu sama lain untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, salah satunya adalah sumber daya yang terlibat didalamnya. Dalam pelaksanaan kebijakan program bantuan langsung tunai di Kelurahan Sako Baru, penulis menggolongkan SDM yang terlibat dalam dua kategori yaitu; sumber daya manusia sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia. Dalam hal ini yang pertama adalah sumber daya sarana dan prasarana. Untuk pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Kelurahan Sako Baru tentu saja membutuhkan sarana dan prasarana agar terciptanya hasil yang maksimal dan memuaskan masyarakat dalam melaksanakan tugas tersebut. Sarana dan prasarana yang buruk akan mempengaruhi proses dari pelaksanaan kebijakan tersebut serta akan mengakibatkan pada proses penanganan program bantuan langsung tunai tersebut. prasarana yang sedang menjadi permasalahan dalam beberapa waktu belakangan ini adalah masalah kendaraan operasional kantor. Banyak masyarakat yang menerima Program ini adalah yang sudah lanjut usia sehingga terkadang mereka kesulitan untuk datang ke kantor lurah untuk mendapatkan pelayanan yang menjadi hak mereka. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia sebagai yang dilibatkan dalam kebijakan ini. Sumber daya manusia memegang peranan penting untuk menjamin kebijakan ini terlaksana dan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Pada kebijakan program bantuan langsung tunai di Kelurahan Sako baru, sumber daya manusia sangatlah penting sgar kebijakan dapat berjalan serta terkontrol dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada.

Seluruh anggota tim sangatlah penting dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai yang telah dibuat oleh pemerintah. Program bantuan langsung tunai tersebut dapat berjalan maksimal apabila seluruh anggota tim dapat saling berkerjasama dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggota tim yang tidak berintegritas akan mempengaruhi hasil dari baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, hai itu akan menjadi penentu apakah masyarakat puas atau tidak dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sako baru, Kecamatan Sako, Kota Palembang perlu dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku agar program BLT ini dapat berjalan dengan tepat sasaran sehingga program tersebut dapat memberikan rangsangan yang positif kepada masyarakat miskin untuk mau berusaha memperbaiki kondisi kehidupannya.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan bahwa pelayanan masyarakat yang sudah lanjut usia yang kesulitan untuk datang ke kantor lurah untuk mengurus persyaratan yang ada. Oknum masyarakat juga ada yang berusaha untuk mendapatkan bantuan tersebut sedangkan mereka tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari temuan penelitian yang dilakukan dengan judul implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai dalam meningkatkan kesejahteraan di Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako Kota Palembang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan program yang dilakukan oleh pemerintah berupa bantuan langsung tunai di Kelurahan Sako Baru dapat dikatakan Program ini telah berjalan secara konsisten selama bertahun-tahun, membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya, dan telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada
2. Disposisi masyarakat yang menyambut dengan baik dan mendukung program yang diselenggarakan ini karena masyarakat merasa dengan program tersebut mereka dapat menggunakan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan dengan adanya program tersebut semakin banyak masyarakat menjadi lebih sejahtera di Kelurahan Sako Baru.
3. Kendala pemerintah dalam program bantuan langsung tunai di Kelurahan Sako Baru ialah tentang pelayanan masyarakat yang sudah lanjut usia yang kesulitan untuk datang ke kantor lurah untuk mengurus persyaratan yang ada. Oknum masyarakat juga ada yang berusaha untuk mendapatkan bantuan tersebut sedangkan mereka tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
4. Kelurahan Sako Baru sebagai fasilitator antara program pemerintah pusat dan masyarakat penerima bantuan langsung tunai tidak menyalahgunakan kewenangannya karena masyarakat dapat menerima bantuan langsung tunai tersebut secara nyata dengan membawa kartu tanda penerima bantuan langsung tunai ke PT POS Indonesia.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sako baru, Kecamatan Sako, Kota Palembang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Lurah Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako Kota Palembang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Pengawasan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
- Arifin. 2014. "Pembangunan dan Problem Sosial Di Perkotaan Analisis Problem Kemiskinan Masyarakat Wonokromo Sebagai Dampak Pembangunan Kota Surabaya". Skripsi. Surabaya.